

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan maka jenis bank dapat digolongkan dalam dua jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Dapat dikatakan bahwa hampir semua sektor kehidupan selalu berhubungan dengan perbankan, termasuk sektor usaha kecil yang sangat membutuhkan perbankan untuk membantu mengembangkan usahanya.

Bank Perkreditan Rakyat sebagai salah satu pelaku usaha dalam dunia perbankan memiliki peranan penting dalam rangka ikut memajukan perekonomian di Indonesia meskipun skala kegiatan usahanya tidak sebesar bank umum. Bank Perkreditan Rakyat juga menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk

tabungan dan deposito serta menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Sektor usaha kecil memiliki peran yang cukup besar dalam pengembangan perekonomian nasional. Sektor ini banyak menyerap tenaga kerja dan meningkatkan penghasilan masyarakat. Sektor usaha kecil juga merupakan penghasil barang dan jasa kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau dan juga merupakan sumber devisa negara yang potensial. Namun keberadaan usaha kecil tidak terlepas dari beberapa permasalahan yang selalu menjadi penghambat majunya usaha kecil.

Permasalahan utama yang sering dihadapi usaha kecil adalah permasalahan permodalan. Usaha kecil memiliki kesulitan untuk mengakses sumber-sumber pembiayaan dari lembaga keuangan formal khususnya perbankan. Pengetahuan yang masih kurang dari pemilik usaha kecil dan cukup rumitnya proses yang harus dipenuhi dalam upaya pengajuan pinjaman bisa jadi penyebab usaha kecil sulit untuk memperoleh modal pinjaman dari perbankan demi pengembangan usaha mereka.

Hambatan lainnya adalah pemilik usaha kecil sulit untuk menyediakan agunan atau jaminan yang diminta oleh pihak perbankan atas pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh pemilik usaha kecil sehingga cukup banyak juga pemilik usaha akhirnya terpaksa mencari bantuan dana modal dari pihak non perbankan yang tentunya memberikan bunga pinjaman yang sangat tinggi dan mau tidak mau pemilik usaha kecil menerima kondisi ini. Meskipun proses pinjaman kepada pihak non perbankan ini mudah namun jika tidak berhati-hati maka pemilik usaha kecil akan kesulitan mengembalikan pinjaman dan akhirnya mereka bangkrut.

Sehubungan dengan kesulitan yang dihadapi oleh usaha kecil, pemerintah telah berusaha untuk memberikan solusi dalam mengatasi permasalahan permodalan yaitu dengan mengatur sistem perbankan dan mengarahkan kebijakan perkreditannya secara tepat bagi usaha kecil dimana salah satu hal yang dilakukan pemerintah adalah dengan mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di seluruh wilayah Indonesia yang kegiatannya lebih fokus pada usaha kecil.

Salah satu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia adalah BPR Rokan Hulu yang berdomisili di Kota Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Sebagai salah satu BPR maka BPR Rokan Hulu melaksanakan berbagai kegiatan perbankan baik kegiatan aktif maupun kegiatan pasif. Kegiatan pasif BPR Rokan Hulu adalah menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito sedangkan kegiatan aktif BPR Rokan Hulu adalah menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman (kredit).

Sebagai salah satu pelaku dalam dunia perbankan, BPR Rokan Hulu menyalurkan berbagai jenis kredit yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya dalam hal ini adalah pemilik usaha kecil. BPR Rokan Hulu berusaha untuk membantu mengatasi permasalahan permodalan yang dihadapi oleh usaha kecil sehingga dengan adanya bantuan pinjaman (kredit) ini maka diharapkan usaha kecil semakin berkembang dan mampu bersaing dengan jenis usaha lainnya yang lebih luas.

BPR Rokan Hulu memberikan pelayanan kredit dengan persyaratan yang lebih lunak serta prosedur dan proses yang tidak rumit. Dengan adanya BPR Rokan Hulu maka diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk mengatasi

kesulitan permodalan bagi usaha kecil, sedangkan pemilik usaha kecil harus aktif berperan dalam memanfaatkan fasilitas-fasilitas kredit yang telah disediakan dalam jumlah yang cukup banyak oleh BPR Rokan Hulu.

Semakin banyaknya kredit yang disalurkan oleh BPR Rokan Hulu bagi usaha kecil yang ada di Kabupaten Rokan Hulu maka semakin nampak peran kredit BPR Rokan Hulu dalam mengatasi permasalahan permodalan yang dihadapi oleh usaha kecil di Rokan Hulu. Dengan adanya kredit BPR Rokan Hulu maka usaha kecil harusnya makin berkembang dan makin meningkat penghasilannya serta dan mampu bersaing dengan usaha lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk membuat penelitian skripsi dengan judul: Pengaruh Peran Kredit Bank Perkreditan Rakyat Terhadap Pendapatan Usaha Kecil (Studi Kasus Pada PD. BPR Rokan Hulu Pasir Pengaraian).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan masalah yaitu apakah peran kredit bank perkreditan rakyat berpengaruh terhadap pendapatan usaha kecil pada BPR Rokan Hulu Pasir Pengaraian?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian biasanya berkaitan erat dengan rumusan masalah. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh peran kredit bank perkreditan rakyat terhadap pendapatan usaha kecil pada BPR Rokan Hulu Pasir Pengaraian.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat untuk berbagai pihak. Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan tentang peran kredit Bank Perkreditan Rakyat bagi pendapatan usaha kecil yang ada di Kota Pasir Pengaraian khususnya dan di Kabupaten Rokan Hulu umumnya.
2. Bagi BPR Rokan Hulu Pasir Pengaraian, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk penyaluran kredit kepada pengusaha kecil yang memang membutuhkannya.
3. Bagi Program Studi Akuntansi, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memperkaya khasanah dunia penelitian bidang ilmu akuntansi perbankan.
4. Bagi peneliti lainnya, diharapkan dapat dijadikan salah satu sumber referensi tambahan untuk penelitian yang sejenis.

1.5 Pembatasan Masalah dan Originalitas

Supaya penelitian ini tidak terlalu luas cakupannya maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas dimana penelitian ini hanya membahas tentang pengaruh peran kredit bank perkreditan rakyat terhadap pendapatan usaha kecil, tidak membahas tentang pendapatan usaha menengah dan usaha besar. Tahun amatan yang diteliti yaitu 2018.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Dica Suci Enggar Jati (2015) dengan judul “Pengaruh Pemberian Kredit Modal Kerja Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) Margirizki Bahagia Bantul

Yogyakarta. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pada pemberian Kredit Modal Kerja terhadap tingkat pendapatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Margirizki Bahagia Bantul Yogyakarta.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah dan originalitas serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan teori yang diperlukan dalam menunjang penelitian dan hasil penelitian yang relevan.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi penjelasan mengenai objek penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan jadwal penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi penjelasan mengenai hasil penelitian yang dilakukan beserta pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Berisi penjelasan mengenai kesimpulan dan saran penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kredit

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga tertentu.

Kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan (Ade dan Hardiman, 2009).

Menurut pendapat dari Teguh Pudjo Mulyono (2010) kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang disepakati.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit menurut Martono (2012) sebagai berikut:

1. Kepercayaan, merupakan suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan berupa uang atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa mendatang.

2. Kesepakatan, dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.
3. Jangka waktu, yaitu mencakup masa pengembalian kredit yang disepakati oleh kedua belah pihak.
4. Resiko, meliputi dua hal yaitu faktor kerugian yang diakibatkan adanya unsur kesengajaan nasabah untuk tidak membayar kreditnya padahal mampu dan faktor kerugian yang ditimbulkan oleh unsur ketidaksengajaan nasabah sehingga mereka tidak mampu membayar kreditnya, misalnya akibat terjadi musibah bencana alam.

Tujuan utama pemberian kredit menurut Kasmir (2012) sebagai berikut:

1. Mencari Keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu Usaha Nasabah

Bertujuan untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

Selain mempunyai tujuan, kredit juga memiliki beberapa fungsi penting sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Artinya jika uang hanya disimpan tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan bank dapat digunakan debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat membantu dalam mengeksport barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara, di mana devisa ini dapat dijadikan sebagai alat untuk menjaga stabilitas ekonomi.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Di samping itu, bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat meningkatkan pendapatannya seperti membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal ini, pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

Kasmir (2012) menyebutkan terdapat beberapa kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan dana dapat dilakukan dengan penilaian analisis 5C sebagai berikut:

1. *Character*

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi, dan jiwa sosial. Dari sifat

dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang kemauan nasabah untuk membayar.

2. *Capacity*

Yaitu untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman selama ini dalam mengelola usahanya sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Analisis kapital juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan.

4. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

5. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Penilaian kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7P dengan unsur-unsur penilaian sebagai berikut:

1. *Personality*, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu.
2. *Party*, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam atau klasifikasi atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, dan karakternya.
3. *Purpose*, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.
4. *Prospect*, yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, dengan kata lain usahanya mempunyai prospek yang bagus atau sebaliknya.
5. *Payment*, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.
6. *Profitability*, yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba yang besar.
7. *Protection*, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapat jaminan perlindungan sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman.

2.2 Pendapatan

Tujuan perusahaan didirikan salah satunya adalah untuk memperoleh laba yang didapat dari adanya pendapatan dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran.

Pendapatan merupakan komponen penting dalam operasi perusahaan, sebab pendapatan merupakan suatu ukuran keberhasilan bagi perusahaan dalam menjamin kelangsungan usahanya.

Pengertian pendapatan yang dikemukakan oleh para ahli diungkapkan dengan berbagai versi. Dari pengertian pendapatan yang dikemukakan oleh para ahli tersebut belum menghasilkan suatu kesepakatan yang baku, hal ini disebabkan pendapatan pada umumnya dihubungkan dengan prosedur-prosedur akuntansi yang spesifik, bentuk-bentuk tertentu perubahan nilai dan diasumsikan atau adanya aturan-aturan yang implisit tentang kapan seharusnya pendapatan diakui dan dilaporkan.

Pendapatan secara umum dapat didefinisikan sebagai hasil yang diperoleh suatu perusahaan dalam pelaksanaan operasionalnya selama suatu periode tertentu. Keberhasilan suatu perusahaan dalam menjamin kelangsungan operasionalnya pada umumnya ditentukan dari pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi beban yang timbul dalam memperoleh pendapatan tersebut.

Menurut PSAK Nomor 23 (2015), pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fee*), bunga, dividen, royalti dan sewa.

Menurut Baridwan (2010), pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha atau pelunasan utang (atau kombinasi dari keduanya)

selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama adan usaha.

Menurut Hery (2012) pendapatan adalah arus masuk atau penambahan lain atas asset suatu entitas atau penyelesaian hutang (*liabilities*) atau kombinasi keduanya selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, atau dari aktivitas-aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau operasi inti yang berkelanjutan dari suatu entitas.

Menurut Hendriksen (2011), pendapatan (*revenue*) secara umum diartikan sebagai hasil dari suatu perusahaan, biasanya diukur dalam satuan harga pertukaran yang berlaku. Pendapatan diakui setelah kejadian penting atau setelah proses penjualan pada dasarnya telah diselesaikan.

Berdasarkan beberapa defenisi di atas dapat ditarik suatu pengertian bahwa pendapatan adalah hasil yang diperoleh suatu perusahaan melalui penciptaan dan penyerahan barang atau jasa, atau kegiatan-kegiatan lain yang merupakan operasi normal suatu perusahaan yang mengakibatkan kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban dalam suatu periode tertentu.

2.3 Usaha Kecil

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam salah satu pasalnya mengatur tentang definisi dan kriteria usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah (UMKM). Adapun definisi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yaitu:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

Kriteria usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yaitu:

1. Usaha mikro memiliki aset maksimal Rp 50.000.000 dan omzet maksimal Rp 300.000.000.
2. Usaha kecil memiliki aset lebih dari Rp 50.000.000 s/d Rp 500.000.000 dan omzet lebih dari Rp 300.000.000 s/d Rp 2.500.000.000.
3. Usaha menengah memiliki aset lebih dari Rp 500.000.000 s/d Rp 10.000.000.000 dan omzet lebih dari Rp 2.500.000.000 s/d Rp 50.000.000.000.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil. Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. Usaha Besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya sebagai berikut:

1. Pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.
2. Pengembangan lembaga modal ventura.
3. Pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang.
4. Peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah.
5. Pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4 Bank Perkreditan Rakyat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maka pengertian Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Bentuk hukum BPR dapat berupa perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, pengusaha kecil dan pengusaha menengah. BPR merupakan lembaga perbankan resmi yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan yang berfungsi tidak hanya sekedar menyalurkan kredit dalam bentuk kredit modal kerja, investasi maupun konsumsi tetapi juga melakukan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Menurut Kasmir (2012), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

Menurut Kasmir (2012), beberapa usaha BPR sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2. Memberikan kredit kepada masyarakat.
3. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami *over* likuiditas.

Menurut Kasmir (2012), beberapa usaha yang tidak boleh dilakukan oleh BPR sebagai berikut:

1. Menerima simpanan berupa giro.
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
3. Melakukan penyertaan modal dengan prinsip *prudent banking* dan *concern* terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah.
4. Melakukan usaha perasuransian.
5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR.

Bank umum dan BPR memiliki tugas yang hampir serupa karena sama-sama memberikan kredit pada masyarakat. Namun jika dilihat dari usahanya, bank umum dan BPR memiliki perbedaan. Perbedaan antara keduanya terletak pada kegiatan memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran. Bank umum memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sedangkan BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.5 Hasil Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian yang terkait dengan judul penelitian yang akan penulis lakukan dapat dilihat berikut ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dica Suci Enggar Jati (2015) dengan judul “Pengaruh Pemberian Kredit Modal Kerja Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) Margirizki Bahagia Bantul Yogyakarta. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh yang positif dan signifikan pada pemberian Kredit Modal Kerja terhadap tingkat pendapatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Metode pengumpulan data terdiri dari angket, wawancara, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas, uji linieritas, uji regresi linier sederhana, uji t, dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pada pemberian Kredit Modal Kerja terhadap tingkat pendapatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) Margirizki Bahagia Bantul Yogyakarta.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Indria Widyastuti dan Dewi Yuliandari (2016) dengan judul Analisis Peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Terhadap Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil (UMK). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui besarnya porsi kredit modal kerja yang telah disalurkan oleh BPR kepada UMK terhadap total pemberian kredit modal kerja yang telah disalurkan oleh Perbankan kepada UMK di Bandung (khususnya Kabupaten Bandung) dan Kota Cimahi, untuk menguji apakah kredit modal kerja yang telah disalurkan oleh BPR dapat meningkatkan penjualan dan laba UMK di Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi, dan untuk mengetahui faktor-faktor apa

saja yang mempengaruhi efektifitas pemberian kredit modal kerja oleh BPR terhadap peningkatan penjualan dan laba UMK di Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah bersifat kuantitatif deskriptif yaitu menggunakan rumus-rumus statistik dalam mengidentifikasi dan mengolah variabel yang muncul dari problema yang akan dijawab dan bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat, yang menjadi objek penelitian ini berdasarkan apa yang terjadi. Populasi dalam penelitian ini adalah Usaha Mikro Kecil (UMK) di wilayah Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi yang mendapatkan pinjaman modal kerja dari BPR sedangkan jumlah sampel dihitung dengan rumus slovin dan diperoleh sebanyak 100 sampel penelitian. Model Analisis Data menggunakan uji statistik deskriptif, uji normalitas data, uji regresi linier sederhana, uji parsial dengan uji t, dan uji koefisien determinasi. Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka hasilnya peran BPR dalam pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil masih menempati porsi yang relatif kecil jika dibandingkan dengan pembiayaan oleh Bank Umum. Kredit modal kerja yang disalurkan oleh BPR kepada UMK memiliki pengaruh positif terhadap rata-rata peningkatan omzet penjualan UMK selama periode tiga tahun setelah penerimaan kredit modal kerja. Kredit modal kerja yang disalurkan oleh BPR kepada UMK memiliki pengaruh positif terhadap rata-rata *net profit margin* UMK selama periode tiga tahun setelah penerimaan kredit modal kerja.

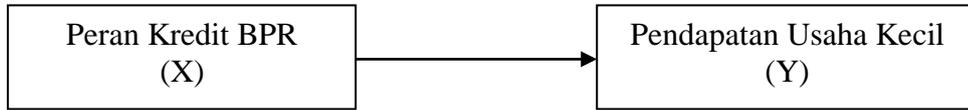
3. Penelitian yang dilakukan oleh Maria Sekararum (2008) dengan judul Peran Kredit Bank Perkreditan Rakyat Bagi Pendapatan Usaha Kecil (Studi Kasus Pada PT. BPR Masaran Mitraanda, Sragen). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan rata-rata pendapatan usaha kecil sebelum mengambil kredit dan sesudah mengambil kredit. Metode pengumpulan data terdiri dari kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan langkah-langkah yaitu: (1) Melakukan perhitungan pendapatan rata-rata usaha kecil sebelum mengambil kredit (2) Melakukan perhitungan pendapatan rata-rata usaha kecil sesudah mengambil kredit (3) Melakukan perbandingan antara rata-rata pendapatan usaha kecil sebelum mengambil kredit dan pendapatan usaha kecil sesudah mengambil kredit dengan membuat tabel perbandingan (4) Melakukan analisis antara rata-rata pendapatan usaha kecil sebelum mengambil kredit dan rata-rata pendapatan usaha kecil sesudah mengambil kredit dengan menggunakan uji statistik beda rata-rata. Hasil dari analisis data menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan usaha kecil sebelum mengambil kredit dan rata-rata pendapatan usaha kecil sesudah mengambil kredit di PT. BPR Masaran Mitraanda, Sragen berbeda secara signifikan.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Putu Pikodana, Made Nuridja, dan Lulup Endah Tripalupi (2013) dengan judul Pengaruh Pemberian Kredit PT. BPR Suryajaya Kubutambahan Terhadap Pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM) kecamatan Sawan kabupaten Buleleng sebelum mendapatkan kredit dari PT.

BPR Suryajaya Kubutambahan (2) bagaimana pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM) kecamatan Sawan kabupaten Buleleng sesudah mendapatkan kredit dari PT. BPR Suryajaya Kubutambahan, dan (3) untuk mengetahui seberapa besar perbedaan pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM) kecamatan Sawan kabupaten Buleleng sebelum dan sesudah mendapatkan kredit dari PT. BPR Suryajaya Kubutambahan. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kausalitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah usaha kecil menengah (UKM) sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah pendapatan UKM sebelum mendapatkan kredit dan pendapatan UKM sesudah mendapatkan kredit. Data dikumpulkan dengan metode (1) dokumentasi dan (2) wawancara. Data dianalisis dengan analisis statistik menggunakan nilai rata-rata hitung dan uji beda (*t-test*). Hasil penelitian ini menunjukkan pendapatan (1) rata-rata sebelum mendapatkan kredit adalah sebesar Rp. 32.800.000,00 tahun 2012, (2) rata-rata sesudah mendapatkan kredit adalah sebesar Rp. 39.880.000,00 tahun 2013, dan (3) terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan UKM sebelum mendapatkan kredit dengan pendapatan sesudah mendapatkan kredit dengan *t* hitung yang diperoleh sebesar 6,919 sedangkan *t* tabel yang diperoleh sebesar 2,04. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian kredit PT BPR Suryajaya Kubutambahan mampu meningkatkan pendapatan UKM.

2.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu peran kredit BPR dan pendapatan usaha kecil sehingga kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar

dibawah ini:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.7 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian menurut Sugiyono (2012) merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Adapun hipotesis penelitian ini yaitu: Diduga bahwa peran kredit BPR berpengaruh positif terhadap pendapatan usaha kecil pada BPR Rokan Hulu Pasir Pengaraian.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah BPR Rokan Hulu Pasir Pengaraian yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Kampung Padang Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk deskriptif kuantitatif. Dalam hal ini, penulis akan menjelaskan dan mendeskripsikan variabel dalam penelitian yaitu peran kredit BPR dan pendapatan usaha kecil pada BPR Rokan Hulu Pasir Pengaraian sesuai dengan data penelitian.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data belum jadi berupa kuisisioner yang akan disebarakan kepada para responden dimana data-data dalam penelitian ini penulis peroleh dari para pemilik usaha kecil yang mengambil kredit di BPR Rokan Hulu Pasir Pengaraian.

3.4 Populasi dan Sampel

Menurut pendapat Sugiyono (2012), populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian

dijadikan sampel penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi itu. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pemilik usaha kecil yang mengambil kredit di BPR Rokan Hulu Pasir Pengaraian tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Daftar Pencairan Kredit Usaha Kecil Tahun 2019
PD. BPR Rokan Hulu Pasir Pengaraian

Jenis Kredit	Jumlah Debitur	Plafond (Rp)
Wirausaha	65	1.343.500.000
Bakulan	52	244.500.000
Total	117	1.588.000.000

Sumber: BPR Rokan Hulu, 2020

Sedangkan sampel dalam penelitian ini sebanyak 40 pemilik usaha kecil yang mana ditentukan dengan cara sampel acak atau *random sampling*.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik angket atau kuisioner dimana penulis mengambil data dari para responden dengan menyebarkan kuisioner yang akan diisi oleh para pemilik usaha kecil sebagai responden penelitian.

3.6 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional dalam penelitian ini yaitu:

1. Peran kredit BPR yaitu manfaat yang diterima oleh pemilik usaha kecil yang mengambil kredit di BPR Rokan Hulu. Penulis mengajukan kuisioner kepada responden untuk mengetahui peran kredit BPR yang diterima oleh pemilik usaha kecil.

2. Pendapatan usaha kecil yaitu hasil yang diperoleh pemilik usaha kecil setelah mengambil kredit di BPR Rokan Hulu. Penulis mengajukan kuisisioner kepada responden untuk mengetahui pendapatan setelah memperoleh kredit.

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel independen atau variabel bebas berupa peran kredit BPR dan variabel dependen atau variabel terikat berupa pendapatan usaha kecil.

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Uji Persamaan Regresi Linier Sederhana

Uji regresi yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana yang dihitung dengan bantuan aplikasi SPSS. Analisis regresi linier sederhana digunakan karena variabel bebasnya hanya satu variabel. Adapun persamaan regresi linier sederhana yaitu:

$$Y = a + bx$$

Keterangan:

Y = Pendapatan usaha kecil

a dan b = Bilangan Konstanta

X = Peran kredit BPR

3.7.2 Uji Koefisien Korelasi

Untuk menghitung korelasi atau hubungan antara kedua variabel (X dan Y) digunakan uji koefisien korelasi (r). Uji ini untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien korelasi antara nol dan satu. Nilai r yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas sedangkan jika

nilainya mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Besarnya koefisien korelasi dihitung dengan aplikasi SPSS dengan melihat angka r berdasarkan output SPSS.

Klasifikasi hubungan antara kedua variabel penelitian ditentukan dengan berpedoman kepada kriteria di bawah ini:

Tabel 3.2
Klasifikasi Korelasi Variabel Penelitian

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,80-1,000	Sangat Kuat
0,60-0,799	Kuat
0,40-0,599	Cukup Kuat
0,20-0,399	Rendah
0,00-0,199	Sangat Rendah

Sumber: Sugiyono, 2012

3.7.3 Uji t Untuk Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan uji t dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kemampuan variabel independen (peran kredit BPR) dalam menjelaskan variabel dependen (pendapatan usaha kecil). Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha = 5\%$). Menurut Sugiyono (2012) pengambilan keputusan uji hipotesis parsial dapat mengacu pada dua hal yaitu dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel atau dengan membandingkan nilai signifikan dengan nilai probabilitas 0,05. Dasar keputusan uji hipotesisnya yaitu:

1. Jika nilai t hitung $>$ nilai t tabel, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Sebaliknya jika nilai t hitung \leq nilai t tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y.

2. Jika nilai signifikansi \leq nilai probabilitas 0,05 artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Sebaliknya jika nilai signifikansi $>$ nilai probabilitas 0,05 artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y.